

ABSTRAK
**GUGATAN KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN SURAT KETERANGAN
GANTI RUGI DI ATAS TANAH HAK MILIK YANG BERSERTIPIKAT (Studi
Kasus Perkara Nomor 97/Pdt/G/2009/Pengadilan Negeri Pekanbaru)**

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, salah satu alas hak yang diperkenankan selain akta autentik adalah surat di bawah tangan.

Penguasaan tanah untuk pertama kali, khususnya di Pekanbaru dengan mengadakan pembukaan lahan dengan cara yang dikenal dengan istilah Tebang Tebas, kemudian untuk mengalihkan tanah tersebut barulah disebut Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang tanahnya diganti rugi (penggarap) dan pihak yang memberi kerugian (pembeli).

Sebagai permasalahan dalam Tesis ini: (1) Bagaimana kekuatan hak atas tanah berdasarkan sertipikat dan surat keterangan ganti rugi? (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 97/Pdt/G/2009/Pengadilan Negeri Pekanbaru?

Untuk menjawab perumusan masalah tersebut dilakukan penelitian yakni di Provinsi Riau yaitu di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Untuk mendukung penelitian ini digunakan teori *triadism law theory* dan teori bekerjanya hukum sebagai applied theory. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif* atau hukum normative, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* dan Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis data *kualitatif*.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Sertipikat merupakan alat bukti yang sempurna tetapi dalam pembuktiannya tergantung oleh alas hak dasarnya. Kekuatan hak atas tanah berdasarkan SKGR yang dibuat oleh camat pada dasarnya tidaklah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat 2) Majelis hakim menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguasai objek sengketa tanpa alas hak, bahwa perbuatan tergugat tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku maupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati.

Saran atau rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebaiknya ada kordinasi antara instansi terkait antara Kantor Pertanahan dengan Kepala Desa (Lurah) dan Camat. Sehingga pembuatan Surat Riwayat Tanah ataupun SKGR ini mempunyai registrasi yang baik.

Kata Kunci : *Gugatan Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR). Sertipikat Hak Milik*

ABSTRACT

LAND OWNERSHIP CLAIMS BASED ON COMPENSATION CERTIFICATE IN THE CERTIFICATE LAND (Study Of Case No 97 / Pdt / G / 2009 / Pekanbaru District Court)

Certificate is a certificate of proof applicable right as a strong evidence of the physical data and juridical data contained therein. As in Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, one that allowed the right base in addition to an authentic deed is a letter under the hand.

Regarding land tenure for the first time, especially in Pekanbaru to conduct land clearing in a manner known as Cutting Tebas, and then to transfer the land was then called the Letter of Indemnity (SKGR). Letter of Indemnity (SKGR) made by the parties concerned, ie that the land be compensated (cultivators) and the party that gave losses (buyer).

The problems of this thesis are: (1) How is the power of land rights by a certificate and a certificate of indemnity? (2) How is the basic consideration of the judge in the decision No. 97 / Pdt / G / 2009 / Pekanbaru District Court?

To answer the problem formulation of the research conducted in the province of Riau, namely in the District Court of the city of Pekanbaru. To support this research used triadism theory of law theory and theory of operation of the law as applied theory. The method use in this research is normative juridical approach or normative law, the specifications in this research is descriptive analytical and data analysis method use is qualitative data analysis methods.

The results of this study are: (1) Certificate is the perfect evidence but the proof is hanging by a pedestal basic rights. Strength of land rights by SKGR made by Camat basically does not have the force of law as an instrument 2) The judges declare the defendant has committed an unlawful act to master the object of dispute without the right base, that the actions of the defendant had violated subjective rights of others or in conflict with sipelaku legal obligations or contrary to decency, accuracy and caution.

Suggestion or recommendation in this research is that there should be coordination between the relevant agencies of the Land Office with the Village Head (headman) and district head. Thus making the land or SKGR Letters History has a good registration.

Keywords: Land Ownership Lawsuit, Certificate of Compensation (SKGR).
Certificate of Property Rights